

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/ DOKUMEN/ JURNAL

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. 2016. *Kecamatan Lembor Selatan dalam Angka 2016*. Katalog BPS: 1102001.5315032
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Davidson, Jamie S, David Henley, Sandra Moniaga (Ed). 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITVL-Jakarta, Jakarta
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. 2007. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*. Jakarta
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hadikusuma, Hilman. 1981. *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Penerbit Alumni, Bandung
- Janggur, Petrus. 2008. *Butir-Butir Adat Manggarai Buku 1*. Perc. Artha Gracia, Ruteng
- Lawang, Robert. 1999. *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat, Pendekatan Sosiologik*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1965. *Desa*. Sumur Bandung, Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Soegiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sunardjo, R.H. Unang. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Tarsito, Bandung
- Suryabrata, Sumadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tabuni, Ebara. 2012. *Peranan Pemimpin Informal dan Formal di Desa Bogonuk Distrik Woniki Kabupaten Tolikara*. Holistik : Journal of Social and Cultural Anthropology. Tahun V No. 10A/Juli-Desember, ISSN : 1979-0481

Toha, Suherman. 2011. *Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Study Empiric di Bali)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

WEBSITE

Adu, Eduardus. 2014. *Pengungkapan Karakteristik Matematika pada Pembagian Tanah dalam Budaya Manggarai NTT (Sebuah Tinjauan Ethnomatematika)*. Diakses melalui <http://atacenggo.blogspot.co.id/>

Atkinson, Rowland dan John Flint. 2001. *Accessing Hidden and Hard-to-Reach Populations: Snowball Research Strategies*. Department of Sociology University of Surrey Guildford. Tulisan pada <http://sru.soc.surrey.ac.uk>

Kementerian Pekerjaan Umum. *Jumlah Satuan Kerja dan Alokasi Dana Tahun 2015, (PAMSIMAS Desa Watu Tiri)*. Diakses melalui <https://eproc.pu.go.id>

Kementerian Dalam Negeri. *Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Diakses melalui <http://www.kemendagri.go.id>

Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. *Sekilas Program Pendamping Desa*. Diakses melalui <http://www.pendampingdesa.or.id>

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Humas Kabupaten Manggarai Barat. *BPN Manggarai Barat Bagikan 604 Sertifikat Tanah Gratis*. Diakses melalui <http://humas.manggarai Baratkab.go.id/bpn-manggarai-barat-bagikan-605-sertifikat-tanah-gratis/>

Pemerintah Desa Sangatta Utara. *Lembaga Adat*. Diakses melalui www.sangattautara.desa.id

Rohman, Mojibur. 2011. *Nagari: Pemerintahan Adat Minangkabau, Sumatra Barat*. Diakses melalui www.melayuonline.com

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Surunbung



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Hubungan Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa Watu Tiri, Kabupaten Manggarai Barat

BRIAN DHIRA W, Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintah

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan untuk
Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa